

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANALISIS JABATAN (SIMANJA) DALAM PERENCANAAN ASN DI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)

Muhammad Iqbal¹, Simon Sumanjoyo Hutagalung², Dewie Brima Atika³

¹²³Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Alamat Korespondensi : soemandjaja2@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the effectiveness of the Job Analysis Management Information System Application (SIMANJA) and what factors support and inhibit the use of the SIMANJA application in the Regional Personnel Agency (BKD) of Lampung Province. The problem with this research is that the process of implementing and preparing planning for the State Civil Apparatus (ASN) within the Lampung Province government is not yet effective and efficient because it is done manually. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis using DeLone and McLean's (2003) information system success assessment model, namely system quality, information quality, service quality, intention to use, user satisfaction and net benefits. Data collection is by interviews, observation and documentation. In analyzing data using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research shows that the SIMANJA application in BKD Lampung Province is effective, fulfills the elements of ease and comfort of use, the information provided is accurate, good system stability, frequency error small ones, as well as effective management of supervision and archival data storage in the implementation of ASN planning within the Lampung Provincial government. The SIMANJA application also provides the benefits of increasing organizational productivity and cost savings. The researcher's suggestion is to improve the SIMANJA application system by utilizing it service worker and cache The aim is that the application can be used in mode offline or when the computer is not connected to the internet, determine the competency standards required as an operator, conduct a user satisfaction survey using statistical data to see the progressive development of the SIMANJA application, the Lampung Province regional secretariat organization bureau needs to re-emphasize the time given for the preparation of the job analysis and workload analysis.*

Keyword: *Effectiveness, BKD, SIMANJA*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA)

dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi SIMANJA di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. Permasalahan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan penyusunan perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung belum efektif dan efisien karena dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan model penilaian kesuksesan sistem informasi milik DeLone dan McLean (2003) yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, niat untuk menggunakan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi SIMANJA di BKD Provinsi Lampung sudah efektif, memenuhi unsur kemudahan dan kenyamanan menggunakan, informasi yang diberikan akurat, stabilitas sistem yang baik, frekuensi error yang kecil, serta manajemen pengawasan dan penyimpanan data arsip yang efektif dalam pelaksanaan perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Adanya aplikasi SIMANJA juga memberikan manfaat peningkatan produktivitas organisasi dan penghematan biaya. Saran dari peneliti adalah peningkatan sistem aplikasi SIMANJA dengan memanfaatkan service worker dan cache bertujuan agar aplikasi dapat digunakan dalam mode offline atau saat komputer tidak terhubung dengan internet, menetapkan standar kompetensi yang diperlukan sebagai operator, melakukan survei kepuasan pengguna yang menggunakan data statistik terhadap untuk melihat progresif perkembangan aplikasi SIMANJA, Biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Lampung perlu menekankan kembali terkait waktu yang diberikan untuk pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Kata kunci: Efektivitas, BKD, SIMANJA.

Pendahuluan

Aktivitas pembangunan nasional perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penyelenggara tata kelola pembangunan demikian juga pada sektor publik atau pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi sekelompok manusia yang menghimpun dirinya dan saling berkomunikasi secara terstruktur untuk mewujudkan visi organisasi yang terangkum pada volume beban kerja yang berorientasi membangun negara. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan suatu unit kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pasal 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pada pemerintahan, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung menjalankan tugas dan fungsi penuh di bidang kepegawaian dipegang oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung untuk mengatur serta bertanggungjawab pada jalannya bidang kepegawaian daerah Provinsi Lampung. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung salah satu fungsinya menyusun dan melaksanakan formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Formasi kebutuhan, harus berdasarkan perencanaan kebutuhan pegawai yang diproyeksikan dalam periode 5(lima) tahun yang diperinci dalam 1(satu) tahun, kemudian digunakan untuk penyusunan formasi kebutuhan ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung.

Penyusunan formasi ASN merupakan suatu proses dalam menentukan mutu dan jumlah calon pegawai ASN yang akan direkrut berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan jabatan yang lowong dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran. Penetapan formasi pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan dari kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dalam menyusun dan melaksanakan terkait proses perencanaan ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung dilaksanakan secara manual. Sampai pada tahun 2020 tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara manual khususnya tahapan proses administrasinya. Mulai dari penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, observasi atau peninjauan lapangan oleh biro organisasi terhadap kebutuhan jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan oleh biro organisasi sampai dengan dokumen ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal tersebut tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama tahapan proses penyusunan yang dilakukan secara manual dan belum efektif karena pengolahan data dan penyampaian serta pengawasan informasi masih secara manual tidak sistematis seperti mengirimkan berkas fisik atau dokumen hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan 5 tahun pegawai, dan formasi kebutuhan jabatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Biro Organisasi Provinsi Lampung untuk di *cross check* menyesuaikan sesuai dengan pedoman penyusunan apabila terdapat kesalahan atau revisi maka dokumen tersebut dibalikkan lagi kepada BKD dan dicetak kembali sampai dengan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK). Hal tersebut sangat memakan waktu, serta dokumen tersebut tidak dapat dihimpun dan belum bisa disimpan dengan rapih dan aman karena bersifat fisik atau cetak (Pak Budi dan Pak Dimas BKD Provinsi Lampung, pada Wawancara 2023).

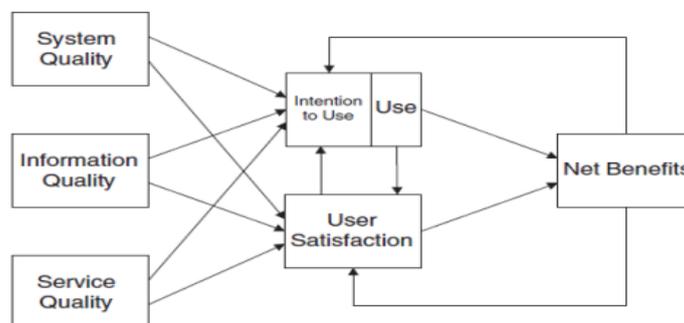
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung membutuhkan sistem pengolahan data dan informasi yang tepat dan terintegrasi secara menyeluruh. Pada tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor 251 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) Online di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Aplikasi SIMANJA adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Lampung yang diusulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2019 dan baru bisa aktif digunakan tahun 2020 yang kemudian aplikasi ini bertujuan untuk peningkatan percepatan penyusunan dan pengawasan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung secara online melalui aplikasi SIMANJA, yang kemudian dokumen tersebut diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pengguna akhir dari aplikasi SIMANJA untuk merencanakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setahun di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.

Maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan melihat secara mendalam menggunakan model efektivitas dalam kesuksesan penggunaan aplikasi SIMANJA dalam proses perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi menggunakan studi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan apa saja faktor penghambat pada penggunaan aplikasi SIMANJA di BKD Provinsi Lampung.

Kerangka Teori

Model Efektivitas Sistem Informasi

Model kesuksesan yang dipeloporkan oleh DeLone dan Mclean (2003) yang dimana akibat dari banyaknya kontribusi penelitian sebelumnya dan akibat adanya banyak perubahan dari peran serta penanganan sistem informasi yang telah berkembang, DeLone dan Mclean (2003) memodifikasi modelnya dan menyebut sebagai model kesuksesan sistem informasi D&M yang dimodifikasi (*updated D&M IS Succes Model*) seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. The Update D&M IS Success Model

DeLone dan McLean (2003) menyatakan bahwa pada model DeLone dan McLean yang telah dimodifikasi, penilaian kesuksesan sistem informasi dimensi yang digunakan yaitu *system quality*, *information quality*, *service quality*, *intention to use*, *user satisfaction* dan *net benefit*:

1. **Kualitas Sistem (*System Quality*)**
Kualitas output yang dihasilkan dari sistem informasi yang digunakan. Adapun pengukur-pengukur yang digunakan untuk kualitas sistem adalah kemudahan menggunakan system, kenyamanan dalam menggunakan, frekuensi sistem error ketika digunakan, ketahanan sistem ketika digunakan.
2. **Kualitas Informasi (*Information Quality*)**
Karakteristik kualitas sistem informasi itu sendiri. Standar pengukur untuk menentukan kualitas informasi adalah tingkat pentingnya informasi, relevansi, kegunaan, informasi yang jelas, pemahaman, dapat dibaca, kejelasan, format, tampilan, isi, akurasi informasi, informasi yang lengkap, informasi yang bermanfaat.
3. **Kualitas Layanan (*Service Quality*)**
Merupakan pengukuran terhadap kualitas pelayanan sebuah sistem informasi. Pada umumnya *service quality* merupakan sebuah perangkat yang dibangun untuk menilai kualitas pelayanan umum oleh peneliti pemasaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengukur kualitas pelayanan yaitu kehandalan, dan responsifitas.
4. **Niat untuk menggunakan (*Intention to Use*)**
Dimensi minat memakai (*intention to use*) digunakan sebagai alternatif dari dimensi pemakaian (*use*). Pengukuran dari pemakaian (*use*) mempunyai banyak dimensi, seperti misalnya pemakaian sukarela atau wajib, mendapat informasi (*informed*) atau tidak mendapat informasi (*uninformed*), dan lainnya. De Lone dan McLean (2003) mengusulkan pengukuran alternatif, yaitu minat memakai (*intention to use*). Minat memakai adalah suatu sikap (*attitude*). Sedang pemakaian (*use*) adalah suatu perilaku (*behaviour*).
5. **Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)**
Kepuasan pengguna berkaitan dengan respons penerima terhadap penggunaan output sistem informasi. Pengguna (*use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*) sangat erat berhubungan. Pengguna (*use*) harus mendahului kepuasan pengguna (*user satisfaction*) sebagai suatu proses, tetapi pengalaman yang positif karena menggunakan (*use*) akan mengakibatkan kepuasan pemakaian yang lebih tinggi sebagai suatu kausal. Secara sama, peningkatan kepuasan pemakai akan mengakibatkan peningkatan minat menggunakan (*intention to use*) dan kemudian menggunakan (*use*). Pengukuran kepuasan pengguna dapat dilihat berdasarkan kepuasan informasi yang dibutuhkan dan yang diterima, kesenangan, kepuasan atas software, dan kepuasan mengambil keputusan.
6. **Manfaat bersih (*Net Benefits*)**
Pada model ini DeLone dan McLean menggabungkan dampak individual (*individual impact*) dan dampak organisasional (*organizational impact*) menjadi satu variabel yaitu menjadi manfaat-manfaat bersih (*net benefits*). Tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga model tetap sederhana (*parsimony*). Dampak dari sistem informasi sudah meningkat tidak hanya dampaknya pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampak sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumen, kontraktor, sosial bahkan negara. DeLone dan

McLean (2003) mengusulkan untuk menamakannya semua manfaat mejadi suatu manfaat tunggal yang disebut dengan nama manfaat-manfaat bersih (*net benefits*). Pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah pemahaman informasi, pembelajaran, akurasi interpretasi, kesadaran informasi, information recall, identifikasi masalah, peningkatan produktifitas individual, perubahan keputusan, penyebab tindakan manajemen, pengaruh individual, kinerja pekerjaan, kualitas rencana, nilai personal atas SI, kemauan membayar informasi.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti sikap, perilaku, persepsi, motivasi dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa terkait suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena apa yang terjadi oleh subjek peneliti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sumber data didalam sebuah penelitian merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Berdasarkan dari jenis sumbernya, dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini berfokus untuk membahas bagaimana efektivitas Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) dalam perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada tinjauan Pustaka, peneliti akan menggunakan model penilaian kesuksesan sistem informasi milik DeLone dan McLean (2003).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

1. Kualitas Sistem (System Quality)

Menurut DeLone dan McLean (2003) kualitas sistem diukur menggunakan aspek kemudahan penggunaan dan keandalan sistem. Aspek kemudahan penggunaan mencakup kemudahan operator untuk melakukan pekerjaannya serta mengoperasikan sistem tanpa perlu mengikuti pelatihan khusus, sedangkan aspek keandalan sistem mencakup stabilitas sistem ketika digunakan dan terbebas dari kesalahan atau permasalahan.

Penilaian kualitas sistem pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) setiap parameter terpenuhi. Kualitas sistem menunjukkan bahwa aplikasi SIMANJA mudah digunakan karena sudah dilengkapi dengan fitur dan tampilan yang memenuhi permintaan kebutuhan pengguna dalam menyelesaikan perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Aplikasi SIMANJA juga memberikan kenyamanan kepada pengguna karena data yang disimpan dapat dikunci serta terdapat tampilan transaksi terbaru pada setiap fitur sehingga pengguna dapat dengan mudah mengawasi data yang tersimpan dalam aplikasi

SIMANJA. Stabilitas sistem dinilai baik karena aplikasi SIMANJA dapat dioperasikan dengan lancar selama bekerja untuk menyelesaikan perencanaan ASN apabila tidak terjadi masalah pada koneksi internet dan juga pada sistem.

2. Kualitas Informasi (Information Quality)

Menurut DeLone dan McLean (2003) kualitas informasi diukur dengan kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna, tersedia dan dijelaskan di aplikasi. Selain itu, informasi yang diberikan harus akurat yaitu informasi yang diberikan benar dan tidak bias.

Penilaian kualitas informasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) setiap parameter terpenuhi. Kualitas informasi menunjukkan bahwa aplikasi SIMANJA menyediakan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat karena aplikasi SIMANJA menjadi fasilitas dalam menyampaikan informasi jabatan sehingga informasi yang tersedia bermanfaat untuk memenuhi permintaan kebutuhan pengguna dalam menyelesaikan perencanaan ASN, informasi yang tersedia juga sudah akurat dan relevan serta lengkap karena data dalam aplikasi SIMANJA sudah sesuai dengan peraturan seperti fitur analisis jabatan berisikan informasi jabatan yang sesuai dengan PERKA BKN nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian milik badan kepegawaian daerah Provinsi Lampung melalui aplikasi SIMPEDU, serta informasi yang terdiri dari peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan proyeksi kebutuhan 5 tahun pegawai dapat memenuhi semua permintaan kebutuhan pengguna dalam menyelesaikan perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Hanya saja karena sudah terintegrasi dengan data kepegawaian milik badan kepegawaian daerah, berpotensi terjadi informasi yang tidak akurat dan relevan apabila badan kepegawaian daerah tidak perbaharui secara aktual data kepegawaiannya.

3. Kualitas Layanan (Service Quality)

Pada dimensi kualitas pelayanan adalah kualitas dukungan yang diterima pengguna dari pihak pelaksana atau operator dengan tujuan membantu dan memudahkan pengguna dalam menggunakan teknologi informasi. Kualitas layanan yang baik dinilai dari jaminan dan responsifitas. Aspek jaminan menilai dukungan yang diberikan pelaksana untuk dapat membantu pengguna, karena memiliki penguasaan yang baik dalam mengoperasikan SIMANJA. Aspek responsif menilai kecepatan SIMANJA dalam merespon permintaan dan kebutuhan penggunanya.

Penilaian kualitas layanan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) setiap parameter terpenuhi. Kualitas layanan pada aplikasi SIMANJA menunjukkan bahwa pada pengoperasian aplikasi SIMANJA terdapat dukungan tindakan teknis yang diberikan operator kepada pengguna yang mengalami kesulitan karena adanya peran dan kerjasama dari *leading sector* yang berpartisipasi untuk mendampingi pengguna. Kualitas layanan juga menunjukkan bahwa aplikasi SIMANJA ketika dioperasikan merespon dengan cepat karena hanya dengan beberapa *click* saja data sudah otomatis masuk dan terekam dengan cepat.

4. Niat untuk Menggunakan (*Intention to Use*)

Menurut DeLone dan McLean (2003) konsep penilaian niat untuk menggunakan lebih tepat dilihat dalam aspek keinginan atau alasan penggunaan bersifat wajib atau sukarela dan frekuensi penggunaan dari SIMANJA. Aspek alasan keinginan untuk menggunakan mencakup alasan dibalik pengguna menggunakan aplikasi SIMANJA melihat tentang kegunaan sistem terhadap pelaksanaan perencanaan ASN yang pengguna akhir lakukan, dan aspek frekuensi mencakup seberapa sering aplikasi SIMANJA digunakan. Hal tersebut untuk mengetahui sikap dan motivasi pengguna dalam mengadopsi dan memanfaatkan sistem informasi.

Penilaian niat untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) setiap parameter terpenuhi. Niat untuk menggunakan menunjukkan bahwa alasan pengguna menggunakan aplikasi SIMANJA bersifat wajib dalam artian penggunaan aplikasi ini dikarenakan tanggung jawab pengguna untuk menyelesaikan perencanaan ASN yang termasuk dalam pekerjaan. Kerutinan penggunaan aplikasi SIMANJA menunjukkan bahwa pengguna menggunakan aplikasi SIMANJA secara rutin dalam artian selalu digunakan setiap hari selama bekerja karena aplikasi SIMANJA sudah menjadi fasilitas dalam pelaksanaan perencanaan ASN maupun pekerjaan pengguna.

5. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Menurut DeLone dan McLean (2003) kepuasan pengguna dilihat dari kegiatan pengguna secara keseluruhan terkait *input*, proses, dan *output* setelah menggunakan sistem informasi. Aspek *input* yang mengukur aplikasi SIMANJA dilihat dari respon kepuasan pengguna setelah memasukan data ke dalam aplikasi tersebut, aspek proses dilihat dari respon pengguna terhadap pengolahan dan penyimpanan data dalam aplikasi tersebut, dan aspek *output* dilihat dari respon pengguna terhadap informasi tersedia dalam aplikasi.

Penilaian kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) menunjukkan respon puas yang tinggi dari pengguna. Dari empat informan yang tiga diantaranya termasuk pengguna mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi SIMANJA pengguna merasa lebih efisien menyelesaikan perencanaan ASN dibandingkan sebelum adanya aplikasi SIMANJA, dikarenakan oleh *input*, proses, dan *output* aplikasi SIMANJA sangat mudah dan cepat serta efektif dalam membantu proses perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.

6. Manfaat Bersih (*Net Benefits*)

Menurut DeLone dan McLean (2003) manfaat tersebut dilihat dari manfaat yang diberikan sistem informasi terhadap produktifitas pengguna dan organisasi. Manfaat bersih pada aplikasi SIMANJA setiap parameter terpenuhi karena memberikan dampak positif seperti penyelesaian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan jadi lebih efisien dibandingkan dengan sebelum adanya aplikasi SIMANJA. Manfaat lain seperti peningkatan produktifitas dengan penghematan waktu, penghematan biaya dengan *paperless*, penyimpanan data arsip menjadi aman dan rapih serta dapat secara sistematis ditemukan ketika dibutuhkan pengguna,

serta manajemen control yang efisien karena dilakukan secara *online* dapat dilakukan dimana saja.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA)

Faktor Pendukung

1. Fitur dan Tampilan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA)

Fitur dan tampilan aplikasi SIMANJA menjadi faktor pendukung pada penggunaan aplikasi SIMANJA dalam perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Fitur dan tampilan dalam aplikasi SIMANJA ini mencakup ketersediaan informasi yang membantu dalam perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Informasi tersebut meliputi informasi jabatan, peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, proyeksi kebutuhan 5 tahun jabatan, rekap jabatan, rekapitulasi usulan kebutuhan pegawai, dan penyimpanan arsip. Fitur dan tampilan serta informasi didalamnya memudahkan dan membantu dalam penyelesaian pelaksanaan perencanaan ASN kepada pengguna akhir serta sesuai dengan kebutuhan informasi dalam penyusunan rencana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.

2. Adanya Dukungan dan Partisipasi dari pihak Manajemen Puncak

Aplikasi SIMANJA dalam operasinya terdapat 3 (tiga) lembaga yang menjadi *leading sector* yaitu biro organisasi, badan kepegawaian daerah, dan dinas komunikasi dan informatika. Ketiga pilar tersebut memiliki kewenangan yang lebih dalam aplikasi SIMANJA. Biro organisasi memiliki kewenangan dalam penyiapan koordinasi pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan sebagai operator aplikasi SIMANJA. Badan kepegawaian daerah memiliki kewenangan menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun, rekap kebutuhan jabatan, pengusulan kebutuhan pegawai sebagai operator aplikasi SIMANJA.

Dinas komunikasi dan informatika memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan jaringan dan sistem yang terjadi dalam aplikasi SIMANJA. Biro organisasi dan badan kepegawaian daerah sebagai operator aplikasi SIMANJA mendapatkan kewenangan yang lebih yaitu bisa mengunci data yang tersimpan dalam aplikasi SIMANJA, seperti biro organisasi yang dapat mengunci data dalam fitur analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan sedangkan badan kepegawaian daerah dapat mengunci data dalam fitur proyeksi kebutuhan 5 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut menjadi faktor pendukung karena biro organisasi dan badan kepegawaian daerah sebagai pihak yang mengatur terkait kepegawaian menunjukkan komitmennya untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan aplikasi SIMANJA. Sehingga dalam pengembangan aplikasi ini dapat berkoordinasi dengan baik dalam waktu kedepannya dan dapat menyesuaikan dengan peraturan pusat maupun daerah.

3. *Data dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) yang Terintegrasi*

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA) merupakan satu-satunya aplikasi penyusunan, pengelolaan dan informasi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan proyeksi kebutuhan 5 tahun. Informasi yang tersedia dalam aplikasi SIMANJA harus tepat dan akurat agar tidak terjadi kesalahan yang memberikan dampak kerugian bagi individu maupun organisasi. Aplikasi SIMANJA sudah terintegrasi dengan data kepegawaian milik badan kepegawaian daerah Provinsi Lampung. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) sudah terhubung dengan aplikasi SIMANJA. Tujuannya untuk menyediakan data kepegawaian yang akurat dengan milik badan kepegawaian daerah. Hal tersebut menjadi faktor pendukung karena informasi yang tersedia memberikan keamanan dalam pengelolaan data, sehingga hasil dari pengelolaan data lebih efektif dan objektif.

Faktor Penghambat

1. *Adanya potensi gangguan pada Stabilitas Sistem dan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SIMANJA)*

Adapun faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi SIMANJA adalah terkait adanya gangguan pada sistem dan jaringan. Gangguan pada sistem terjadi karena terlalu banyak pengguna yang mengakses aplikasi SIMANJA dalam satu waktu. Ketika dinas pendidikan sedang mengakses aplikasi SIMANJA untuk pemenuhan kebutuhan jabatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan karena terdapat kurang lebih 360 UPT yang mengakses aplikasi SIMANJA dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga terjadi putus kabel fiber optik pada tahun 2022 yang membuat aplikasi SIMANJA maintenance dalam waktu sehari. Imbasnya dari gangguan pada sistem dan jaringan membuat terhambatnya penyelesaian pelaksanaan perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.

2. *Kurangnya Pemahaman terkait Rencana Pemenuhan Kebutuhan Jabatan*

Pemenuhan kebutuhan jabatan adalah kegiatan mengisi formasi kebutuhan jabatan pada suatu perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pengosongan jabatan serta penumpukan beban kerja kepada pegawai lain agar kinerja organisasi optimal dan menghindari beban kerja yang berlebihan terhadap pegawai. Pemenuhan kebutuhan pegawai ini dilakukan berdasarkan pengusulan prioritas kebutuhan jabatan oleh perangkat daerah kepada badan kepegawaian daerah. Rencana pemenuhan kebutuhan jabatan ini yang perlu dijelaskan lebih luas oleh badan kepegawaian daerah Provinsi Lampung kepada perangkat daerah, dikarenakan kurangnya pemahaman terkait rencana pemenuhan kebutuhan jabatan oleh perangkat daerah.

Rencana pemenuhan kebutuhan jabatan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kompetensi pegawai. Imbas dari pada kurangnya pemahaman terkait rencana pemenuhan kebutuhan jabatan menyebabkan ketidaksesuaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan standar

kompetensi pegawai yang memangku kebutuhan jabatan tersebut, sehingga dapat mengganggu produktifitas kerja organisasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian ini dapat diketahui dan disimpulkan bahwa aplikasi SIMANJA sudah efektif dalam membantu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung sebagai pengguna akhir untuk melaksanakan penyusunan perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian aplikasi SIMANJA memenuhi unsur kemudahan dan kenyamanan menggunakan, informasi yang diberikan akurat, stabilitas sistem yang baik, frekuensi error yang kecil, serta manajemen pengawasan dan penyimpanan data arsip yang efektif dalam pelaksanaan perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Adanya aplikasi SIMANJA di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung juga memberikan manfaat peningkatan produktivitas organisasi dan penghematan biaya.

Rekomendasi

1. Peningkatan sistem aplikasi SIMANJA dengan memanfaatkan service worker dan cache. Bertujuan agar aplikasi SIMANJA dapat digunakan dalam mode offline atau saat komputer tidak terhubung dengan internet. Sehingga saat terjadi gangguan koneksi atau jaringan tidak mempengaruhi produktivitas dalam pelaksanaan perencanaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.
2. Perlunya diadakan evaluasi terhadap operator SIMANJA setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk melihat standar kompetensi yang diperlukan sebagai operator aplikasi SIMANJA.
3. Perlu melakukan survei terkait kepuasan pengguna yang menggunakan data statistik terhadap aplikasi SIMANJA untuk melihat progresif perkembangan aplikasi SIMANJA.
4. Biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Lampung perlu meninjau dan menekankan kembali terkait waktu yang diberikan untuk pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, agar peningkatan produktivitas dalam pelaksanaan perencanaan ASN lebih efisien dan aplikasi SIMANJA dapat memberikan manfaat yang optimal.

Daftar Pustaka

- Arif, A. (2013). *Efektivitas Administrasi Perpustakaan Dengan Layanan Sistem Informasi Manajemen (Studi Pada Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Azlin, N. (2012). *Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau (Studi Kasus Ruang Rawat Inap Kelas III)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Daniarsyah, D. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada*

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 3(2).
- Davis, GB (2002). *Sistem informasi manajemen*. PPM, Jakarta.
- DeLone, WH., dan McLean, ER. 1992. *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*. *Information System Research*, 3(1), 60-95.
- DeLone, W. H., McLean, E. R. 2003. *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success : A Ten-Year Update*. *J. Manag. Inf. Syst.* Vol. 19(4): 9–30.
- Denaya, A., & Djumiarti, T. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di BKD Provinsi Jawa Tengah*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 1-13.
- Diani, N. R. (2017). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (Bkdd) Kabupaten Enrekang*. Universitas Hasanudin.
- Fallo, A. (2022). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang*. *Jurnal Administrasi Publik* 17(2), 73-85.
- Frayudha, A. D. (2016). *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Web untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Kecepatan Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang*. Academia Edu.
- Gable, G. G., Sedera, D., & Chan, T. (2008). *Re-conceptualizing information system success: The IS-impact measurement model*. *Journal of the Association for Information Systems*, 9(7), 377-408.
- Garnida, A, & Priansa, DJ (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif. Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta.
- Ginting, D. B. (2009). *Structural Equation Model (SEM)*. *Media Informatika*, 8(3), 121-134.
- Gunawan, A (2003). *Analisis Consumer Decision Model untuk pengukuran efektifitas periklanan*. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*.
- Hadawiah, R. (2019). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hair, J.F. (1998). *Multivariat Data Analysis*. New Jersey, Prentice Hall.
- Harsono (2011). *Perencanaan Kepegawaian*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Herawati, L., & Hayati, R. (2020). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong*. *JAPB*, 3(2), 857-869.
- Indonesia, P. N. R. (2017). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil*.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945 (pp. 67-80)*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Irawan, B. (2017). *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam*

- Pelayanan Publik*. Jurnal Paradigma (JP), 2(1), 174-201.
- Irawan, Prasetya, dkk. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIA-LAN Press: Jakarta.
- livari. (2005). livari, Juhani, "An Empirical Test of the DeLone-McLean Model of Information System Success", *The Database for Advances in Information Systems, ProQuest Computing*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 tentang *Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah*. Pemerintah Pusat.
- Lexy J, Moleong. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marlina, S. (2017). *Pendekatan Delone And Mclean Untuk Mengkaji Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Paket Aplikasi Sekolah (SIM-PAS)*. Paradigma, 19(2), 175-188.
- Moleong, LJ (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhidin, S Ali (2009). *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Mutiarin, D, & Zaenudin, A (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan: penelusuran konsep dan teori.*, Pustaka Pelajar.
- Nawawi, I (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja [Organizational Culture Leadership and Performance]*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Pangestika, A. L., & Sari, Y. P. (2016, May). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. In *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK* (Vol. 1, No. 1).
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality*. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung*. Pemerintah Provinsi Lampung.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan*. Badan Kepegawaian Negara.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Badan Kepegawaian Negara.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara*. Badan Kepegawaian Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang *Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). *Efektivitas program BPJS kesehatan di kota*

- Semarang (studi kasus pada pasien pengguna jasa BPJS kesehatan di puskesmas Srandol). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416-430.
- Petter, S., DeLone, W., & McLean, E. (2008). *Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships*. *European Journal of Information Systems*, 17(3), 236-263.
- Purnomo, A. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (Simpedu) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung*. e-JKPP, 4(2), 1-22.
- Putrawan, N. A., Putri, I. G. A. M. A. D., & Ariyanto, D. (2017). *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Gianyar*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(4), 1639-1672.
- Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2019-2014.
- Rochaety, E. d. (2011). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Jakarta. Pt Bumi Aksara.
- Seddon, P. B. (1997). *A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success*. *Information Systems Research*, 8(3), 240-253.
- Siagian, SP (2001). *Efektivitas Organisasi Kriteria Pengukuran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyan B. 2023. "Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SI-Manja). Hasil Wawancara Pribadi: 03 Maret 2023, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
- Srimanjaya D. 2023. "Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan (SI-Manja). Hasil Wawancara Pribadi: 08 Maret 2023, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryadi, Y (2011). *Pengembangan sistem informasi pemetaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan Jakarta Selatan; studi kasus di Dikmenti*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Susanto, A (2007). *Sistem Informasi Manajemen*, Lingga Jaya. Bandung. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Tangkilisan, NH (2005). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tika, Moh.Pabunda, M. (2010). *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan (3rd ed.)*. PT Bumi Aksara.
- Tjiptoherijanto, P. (2011). *Reformasi Perencanaan Kepegawaian*. *Civil Service Journal*, 5(2 November).
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478.
- Wixom, B. H., & Todd, P. A. (2005). *A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance*. *Information Systems Research*, 16(1), 85-102.
- Weber 1999, Weber Ron *Information System Control and Audit*, New Jersey, Prentice Hall, Inc 1999.